



Foto: Alfan Nasrulloh

Perlunya ke-LUWES-an dalam menyusun rencana pembangunan rendah emisi di Indonesia

Oleh: Feri Johana, Sonya Dewi, Degi Harja Asmara, Putra Agung dan Subekti Rahayu

Perubahan iklim global telah menjadi isu yang mendunia, bahkan menjadi bahasan para pakar dari berbagai bidang ilmu setiap tahunnya untuk mencari upaya dalam memperlambat dampak perubahan iklim global tersebut. Indonesia, sebagai bagian dari dunia, melalui komitmen yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ikut berperan dalam upaya untuk menghambat dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi sebesar 26% secara mandiri. Salah satu upaya untuk mencapai komitmen tersebut adalah melalui pembangunan rendah emisi yang dapat dimulai dari skala lokal (kabupaten, provinsi) dan skala nasional.

Tentunya, untuk menuju pada pembangunan rendah emisi ini diperlukan suatu perencanaan yang mengintegrasikan berbagai sektor, terutama sektor penggunaan lahan dengan melibatkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. World Agroforestry Centre (ICRAF), mengemas tahapan-tahapan perencanaan pembangunan rendah emisi ini dalam suatu perangkat yang

disebut LUWES (Land Use Planning for Low Emission Development Strategy).

Apa yang dimaksud dengan pembangunan rendah emisi?

Pembangunan dapat dipandang sebagai sebuah proses yang harus dilaksanakan secara terus menerus oleh setiap wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, sehingga pembangunan merupakan upaya mutlak yang harus dilaksanakan. Lahan merupakan salah satu aset yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan. Potensi ekonomi lahan seringkali merupakan pertimbangan utama dalam penentuan jenis penggunaan lahan. Pembangunan rendah emisi (*low emission development*) merupakan salah satu konsep yang saat ini sedang berkembang, dimana pembangunan yang dilaksanakan selayaknya memperhatikan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, pembangunan rendah emisi tersebut adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi di

sisi lain pertimbangan lingkungan dalam hal ini emisi GRK-nya dapat dikendalikan secara baik.

LUWES sebagai kerangka kerja pembangunan rendah emisi di sektor perencanaan penggunaan lahan

Perangkat LUWES ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu para pihak dalam merencanakan penggunaan lahan, konsekuensi penggunaan lahan tersebut terhadap emisi dan manfaat ekonomi di wilayahnya, baik secara lokal (kabupaten, provinsi) dan nasional. Melalui perangkat LUWES ini para pihak dapat membangun skenario penggunaan lahan di wilayahnya yang berorientasi pada pembangunan rendah emisi, namun juga memberikan manfaat ekonomi.

LUWES dibangun dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan yang mencakup ekonomi dan ekologi, dan aspek sosial yaitu keterlibatan para pihak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, terutama sektor penggunaan lahan suatu wilayah. Integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan, yang

berupa perencanaan dari pemerintah pusat ke daerah (*top down*) maupun perencanaan yang berasal dari daerah ke pusat (*bottom up*) secara seimbang sehingga kepentingan pusat daerah dapat terakomodasi secara baik, adanya keadilan diantara berbagai sektor, inklusifitas terhadap semua *stakeholders*, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, serta berdasarkan data dan informasi yang valid sangat diperlukan dalam implementasi LUWES. Dengan demikian, LUWES diharapkan dapat menjadi alat dalam penyusunan strategi pengurangan emisi di suatu wilayah dengan mengacu pada langkah-langkah yang terintegrasi di dalamnya. Secara garis besar, langkah-langkah dalam LUWES adalah:

1. Membangun unit perencanaan yang merupakan integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan keruangan;
2. Mengenali pola perubahan penggunaan lahan dan menghitung emisi berbagai aktifitas yang berbasis penggunaan lahan di masa lalu dan mengestimasi emisinya atau dikenal dengan emisi 'historis';
3. Membangun skenario 'baseline' penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan serta

mengestimasi tingkat referensi emisi (REL) skenario;

4. Membangun skenario perubahan penggunaan lahan rendah emisi;
5. Melakukan *trade-off analysis*;
6. Menterjemahkan strategi perencanaan yang dihasilkan dari simulasi skenario penggunaan lahan ke dalam aksi perencanaan

Referensi Tingkat Emisi

Referensi Tingkat Emisi atau sering disebut sebagai REL (*Reference Emission Level*) merupakan acuan tingkat emisi GRK yang telah dipilih dan disepakati bersama sebagai suatu pedoman dari upaya pengurangan emisi yang diperoleh dari hasil proyeksi emisi baik berdasarkan sejarah emisi masa lalu, maupun berdasarkan pertimbangan aktivitas di masa yang akan datang.

Bagi bangsa Indonesia pembangunan yang berdampak pada rendahnya emisi GRK khususnya dari sektor penggunaan lahan merupakan langkah awal partisipasi aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Perpres 71/2011 mengenai Upaya Inventarisasi Gas rumah Kaca dan Perpres 61/2011 mengenai Penyusunan Rencana Aksi

Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Dalam penyusunan rencana aksi tersebut salah satu tahapan penting yang harus dilakukan adalah membuat REL, karena REL ini selanjutnya akan digunakan untuk menentukan strategi pengurangan emisi.

Penentuan REL merupakan kewenangan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, serta memperhatikan kepentingan daerah (kabupaten dan provinsi). Berbagai alternatif metode dapat digunakan untuk membuat baseline scenario dalam menentukan REL, oleh karena itu di sinilah pemerintah diperlukan ke-luwes-annya dalam menentukan kebijakan yang seoptimal mungkin dapat menguntungkan semua pihak.

Membangun sinergitas dan kesamaan kapasitas

Target penurunan emisi yang telah dicetuskan oleh Presiden merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan unsur keadilan. Oleh karena itu, perlu kesamaan persepsi dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat (antar sektor) dan pemerintah daerah.

Integrasi berbagai kepentingan sektor harus ditempatkan sebagai satu-kesatuan kebijakan yang utuh, tanpa mengedepankan sektor tertentu. Pemerintah juga harus luwes dalam mengakomodasi sumbangan masing-masing sektor terhadap upaya pengurangan emisi.

Mengimplementasikan LUWES bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana. Intergrasi berbagai bidang keilmuan dengan berbagai data atau informasi dalam satu kesatuan memerlukan ketelitian dan kecermatan, apalagi menyusun skenario untuk suatu kebijakan memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum implementasi, sebaiknya harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama dari masing-masing komponen dalam tahapan LUWES.

Pelatihan sebagai langkah awal dalam implementasi LUWES

Lokakarya tentang Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Penghitungan Business as Usual (BAU) Baseline dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 21 – 25 Mei 2012. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan nasional yang diikuti oleh berbagai pihak di tingkat provinsi hingga nasional.

Pada kesempatan tersebut LUWES diperkenalkan dan dilatihkan kepada 120 orang peserta lokakarya dari pemerintah provinsi seluruh Indonesia (Bappeda dan Dinas Kehutanan) dan unsur kementerian terkait. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis kepada jajaran pemerintah provinsi

dalam membuat Skenario Baseline, REL serta merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat dijadikan Rencana Aksi Daerah-Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Selain LUWES, para peserta lokakarya juga diberi pelatihan tentang REDD Abacus SP (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Abatement Cost Curve Scenario Simulator for Policy Scenario) yang merupakan salah satu komponen penting dalam LUWES. REDD Abacus SP merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan emisi, membangun abatement cost curves dan memprediksi emisi yang akan datang berdasarkan skenario pembangunan berbasis lahan yang dilakukan.

Dengan pelatihan singkat tersebut, diharapkan pemerintah akan dapat menyelenggarakan pelatihan sendiri dan meningkatkan kapasitas serta kemudian membangun RAD GRK

dengan menggunakan alur dan metode yang lebih komprehensif seperti yang diinisiasi dalam LUWES. Sebagai informasi tambahan, progres penyusunan RAN/RAD GRK dapat diakses di Website Sekretariat RAN GRK: <http://sekretariat-rangrk.org/>. Beberapa peraturan, petunjuk teknis serta modul-modul dapat di unduh pada website tersebut.

Hal penting yang ingin dicapai dalam lokakarya tersebut adalah menyamakan persepsi dan penyelesaian agenda penyusunan rencana aksi penurunan emisi yang ditargetkan pada akhir tahun ini untuk selanjutnya masuk dalam tahap implementasi. Dalam lokakarya tersebut masih banyak hal yang menjadi bahan diskusi antara lain kejelasan tahapan, metodologi dan sumber data yang digunakan.

Catatan penting untuk pemerintah

Melihat dinamika yang terjadi saat ini, sepertinya pemerintah sudah menyiapkan kegiatan lanjutan untuk monitoring perkembangan rencana aksi, antara lain melalui pendampingan di tingkat daerah apabila dirasakan masih terdapat kekurangan sumber

daya dan data yang dimiliki oleh daerah. Target waktu yang sangat ketat mengharuskan pemerintah untuk lebih fokus dalam membuat pedoman dan paket kegiatan sehingga semua pihak akan merasa terbantu dan menghasilkan sebuah rencana aksi yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Di sinilah diperlukan ke-luwes-an pemerintah dalam mencapai tujuan dengan mengedepankan aspek efisiensi, efektifitas, partisipasi, inklusifitas, integratif dan penggunaan data dengan memperhatikan kelengkapan dan keabsahan datanya.

Hingga saat ini pemerintah belum memiliki metode atau perangkat yang komprehensif untuk menghitung REL dari sektor berbasis penggunaan lahan, sehingga perlu membangun jaringan dan menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian seperti World Agroforestry Centre (ICRAF) yang telah memiliki hasil-hasil penelitian dan metode-metode yang dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan serta implementasi RAN/RAD GRK untuk mitigasi perubahan iklim.